

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021

Dengan adanya Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau maka dengan demikian Rencana strategis akan lebih memiliki arah kebijakan yang jelas guna menunjang keberadaan kegiatan organisasi pemerintah daerah sebagai unit organisasi yang otonom, memiliki kinerja yang lebih baik, memiliki wawasan ke depan serta menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah, efektif, efisien dan terpadu yang dapat mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau sekaligus sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan sesuai tugas dan fungsi yang diemban, terutama yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang akan dicapai dalam periode 5 (lima) tahun seperti yang tercakup dalam RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2016 – 2021.

Berikut Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau:

Perwujudan visi BPKD melalui implementasi misi diprioritaskan untuk mendukung dan mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau, pada tahun 2016-2021 diarahkan untuk mendukung tiga program unggulan Pemerintah Daerah, yaitu :

1. RT Bersih
2. Beras Daerah
3. Wajib Belajar 16 Tahun

a. VISI

Rumusan Visi BPKD Kabupaten Malinau adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang akan dicapai, dikaitkan dengan kondisi lingkungan internal dan eksternal serta kedudukan, fungsi dan tugas pokok. Perumusan visi BPKD adalah :

Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau yang Efektif, Efisien, Kredibel dan Akuntabel Guna Mendukung Program Gerakan Desa Membangun (GERDEMA)

Arti yang terkandung dari visi di atas adalah:

Efektif	Terselenggaranya tata kelola keuangan yang optimum dalam kinerja dan keluaran yang dihasilkan guna mempercepat pertumbuhan ekonomi Daerah.
Efisien	Tersajinya informasi keuangan Daerah yang tepat waktu, tepat sasaran dan tepat prosedur sesuai dengan peraturan perundangan keuangan yang berlaku.
Kredibilitas	Terwujudnya tata kelola keuangan yang menghasilkan laporan keuangan yang terpercaya, handal dan dapat diuji kebenarannya.
Akuntabel	Terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan

	peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
--	--

b. Misi

**TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN
YANG PARTISIPATIF, INTEGRATIF DAN INOVATIF GUNA
MENDUKUNG GERAKAN DESA MEMBANGUN**

Untuk mewujudkan visi BPKD sebagaimana yang telah digariskan di atas, maka dipandang perlu pula untuk menggariskan beberapa misi yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran BPKD yaitu sebagai berikut:

1. Menyajikan informasi keuangan daerah terkini secara cepat, tepat dan akurat bagi unsur pimpinan maupun pemangku kepentingan lainnya dalam rangka pengambilan keputusan dan arah kebijakan pembangunan Daerah Kabupaten Malinau
2. Mengelola keuangan daerah secara optimum sehingga menghasilkan laporan keuangan Daerah Kabupaten Malinau secara periodik yang dapat dipergunakan pihak intern maupun ekstern guna kelancaran penyerapan anggaran pembangunan Daerah Kabupaten Malinau
3. Mempertahankan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) BPK-RI atas laporan keuangan daerah sebagai wujud Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel
4. Meningkatkan realisasi penyerapan anggaran daerah melalui efisiensi prosedur administrasi keuangan, Akuntansi berbasis

Akrual dan kerja sama lintas sektoral baik saat penyusunan, pelaksanaan maupun pertanggungjawaban APBD

5. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur keuangan daerah baik aparatur pengelola keuangan desa, kecamatan maupun SKPD melalui pelatihan, bimtek, sosialisasi dan konsultasi sehingga terwujud aparatur pengelola keuangan Daerah Kabupaten Malinau yang profesional, berkualitas dan berintegritas
6. Meningkatkan akselerasi penyerapan dan kualitas kegiatan Gerdema, RT Bersih dan Dana Desa melalui system informasi keuangan desa
7. Meningkatkan potensi pendapatan asli daerah setiap tahun
8. Optimalisasi penerimaan pendapatan daerah

1. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikan tujuan ini maka Badan Pegelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Misi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau dalam tahun yang akan datang akan diarahkan pada pencapaian tujuan masing – masing Misi sebagai berikut:

Tabel 2.1
Misi dan Tujuan
Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau

MISI	TUJUAN
1. Melaksanakan Penyusunan rencana dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.	1. Menyiapkan RAPBD dan APBD Kabupaten Malinau
2. Menyusun dan mengembangkan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Melalui Tahap Pelaporan Administrasi Belanja Langsung maupun Tidak Langsung	1. Menyiapkan Laporan Adminstrasi Belanja langsung dan tidak langsung. 2. Mengembangkan Kerjasama dan Sinergitas dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Malinau
3. Menyusun dan Mengembangkan Sistem Pelaporan Keuangan melalui Laporan Realisasi Keuangan, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan	1. Menyiapkan database Laporan Keuangan yang Komprehensif
4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Teknis Bagian Pengelola Keuangan yang inovatif melalui penyediaan sarana dan prasarana Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Menyiapkan daya dukung organisasi terhadap teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau

b. Sasaran Strategis

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas. Karakteristik dari sasaran paling tidak terdiri atas: SMART (Specific, Measurable, Acceptable, Result, Timelines).

Sasaran merupakan bagian integral dalam sistem perencanaan strategik yang terfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas. Sasaran bersifat spesifik, terukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif, sehingga dapat diukur secara nyata dalam jangka waktu tahunan/ jangka pendek.

Berdasarkan fokus sasaran tersebut secara lebih operasional, maka Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau menjabarkan sasaran dan tujuan untuk tahun 2020 pada bagian berikut :

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran
Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau

NO	TUJUAN	SASARAN
1	Menyiapkan RAPBD dan APBD Kabupaten Malinau.	<ul style="list-style-type: none"> • Tersusunnya APBD dan APBDP
2	Menyiapkan Laporan Administrasi Belanja Langsung dan Tidak Langsung	<ul style="list-style-type: none"> • Tersusunnya Laporan Adminstrasi Belanja Langsung dan Tidak Langsung
3	Mengembangkan Kerjasama dan Sinergitas dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Malinau	<ul style="list-style-type: none"> • Tersusunnya Rencana Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau • Tersusunnya Dokumen

		Pelaksanaan Anggaran SKPD
4	Menyiapkan database hasil Laporan Keuangan Kabupaten Malinau yang Komprehensif	<ul style="list-style-type: none"> • Tersusunnya Laporan Keuangan Kabupaten Malinau dan laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah • Tersedianya sistem informasi data yang up to date • Terlaksananya Verifikasi dan Evaluasi atas Pelaksanaan Dokumen Anggaran Pembangunan Kabupaten Malinau
5	Menyiapkan daya dukung organisasi terhadap teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah • Tersedianya sumber daya Bagian Pengelola Keuangan yang berkualitas

		dan handal
--	--	------------

2. Indikator Kinerja

Adapun pencapaian dari sasaran tersebut diperlukan adanya suatu ukuran atau indikator, Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta tugas yang dilaksanakan.

Indikator Kinerja Utama (*Outcome*) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau merupakan indikator kinerja yang berada pada ukuran manfaat bagi *stakeholders* yang menunjukkan peran utama Badan

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau dalam melaksanakan urusan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan kepada Masyarakat. Penetapan indikator dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan program dan kegiatan yang mendukung program tersebut. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan program, sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan indikator keluaran (*output*).

Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 2.3
Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja
Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan alat tulis kantor BPKD 2. Penyediaan barang cetakan, 3. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 4. Penunjang Administrasi Staf Ahli Bidang Hukum, Kesbang dan Pemerintahan.	1. Jumlah Jenis ATK yang dibutuhkan 2. Jumlah jenis Barang Cetak dan Peggandaan yang disediakan 3. Persentase Pelaksanaan

		<ol style="list-style-type: none"> 5. Penunjang Administrasi Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan, Ekonomi dan Pembangunan. 6. Penunjang Administrasi Staf Ahli Bidang Aparatur, Pelayanan Publik dan Hubungan Antar Lembaga 7. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi PBB P2 dan BPHTB 8. Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi dan Bimtek Pajak Daerah 9. Penataan Administrasi Penyusunan Program, Kepegawaian dan Keuangan 10. Penatausahaan Dokumen dan Benda Berharga Pajak Daerah 11. Pengadaan Peralatan Kantor 	<p>Tupoksi PNS BPKD</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Jumlah Bulan Pelayanan Pemerintahan Staf Ahli Bidang Hukum Kesbang dan Pemerintahan 5. Jumlah Bulan Pelayanan Pemerintahan kebutuhan Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan, Ekonomi dan Pembangunan . 6. Jumlah Bulan Pelayanan Pemerintahan Staf Ahli Bidang Aparatur, Pelayanan Publik dan Hubungan Antar Lembaga 7. Jumlah Bulan Terlaksananya koordinasi dan konsultasi PBB P2 dan BPHTB 8. Jumlah Bulan Terlaksananya rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Pajak Daerah 9. Persentase Penataan Administrasi Penyusunan Program, Kepegawaian dan Keuangan 10. Jumlah Dokumen dan Benda Berharga Pajak Daerah 11. Jumlah Jenis Peralatan Perkantoran yang dibutuhkan
--	--	---	--

2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas Instalasi Jaringan SIMDA Keuangan pada OPD di Sekitar Ibu Kota Kabupaten 2. Pemeliharaan Server dan Aplikasi SIM PBB P-2 3. Digitalisasi Arsip Pencairan SP2D OPD 4. Pemeliharaan Sistem Aplikasi Penggajian Kabupaten Malinau (Sistem Informasi Manajemen Gaji TASPEN) 5. Pemeliharaan Aplikasi Pelaporan Secara Online (SPT Online) 6. Pengadaan Website Online PBB P2 dan BPHTB 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Pemeliharaan Jaringan SIMDA online dengan SKPD sekitar ibu kota Kabupaten 2. Jumlah Bulan terupdate nya server dan database aplikasi SIM PBB 3. Jumlah Sistem Data Elektronik Arsip Pencairan SP2D OPD 4. Persentase pelaksanaan Update data Sistem Informasi Manajemen Gaji 5. Jumlah Pemeliharaan Aplikasi Pelaporan secara Online (SPT Online) 6. Persentase pengadaan website online PBB P2 dan BPHT
3	Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan Kepada Bendahara Pengelola Keuangan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau 2. Pembinaan kepada Penyusunan Program OPD Se-Kabupaten Malinau 3. Peningkatan SDM Penatausahaan PPK-OPD Se-Kabupaten Malinau 4. Peningkatan SDM Pengelola Aset/Barang Daerah 5. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah 6. Peningkatan SDM Aparatur Kearsipan 7. Pembinaan Bendahara OPD Tentang Perpajakan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Bendahara SKPD mengikuti Bimbingan dan pelatihan Keuangan 2. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Administrasi Penyusunan Program, Kepegawaian dan Keuangan dengan Efektif dan Ifisien 3. Persentase PPK-SKPD se Kabupaten Malinau yang mengikuti Diklat

		<p>8. Pelatihan Penatausahaan Keuangan Bendahara OPD</p> <p>9. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Pengelola Keuangan</p> <p>10. Pelatihan dan Pengembangan SDM Aparatur Sungram</p> <p>11. Pelatihan dan Pengembangan SDM Aparatur Kepegawaian</p>	<p>4. Persentase PNS Pengelola Aset SKPD yang mengikuti SDM pengelola Aset/barang Daerah</p> <p>5. Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah</p> <p>6. Persentase Aparatur Kearsipan yang mengikuti Diklat Teknis</p> <p>7. Persentase Bendahara SKPD yang mengikuti Bimtek tentang Perpajakan</p> <p>8. Persentase Bendahara SKPD mengikuti Penatausahaan Keuangan</p> <p>9. Jumlah diklat Teknis Pengelolaan Keuangan yang diikuti</p> <p>10. Jumlah diklat Teknis Pengembangan SDM Aparatur Sungram yang diikuti</p> <p>11. Jumlah diklat Teknis Pengembangan SDM Aparatur Kepegawaian Yang diikuti</p>
4	Program Pembinaan dan Fasilitasi	1. Pelaporan dan Koordinasi Penyaluran Dana Desa Ke Provinsi dan Pusat	1. Jumlah Pelaporan dan Koordinasi

	Pengelolaan Keuangan Desa		tentang Penyaluran Dana Desa Ke Provinsi dan Pusat
5	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2021 2. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD 2021 3. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2020 4. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 2020 5. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 6. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 7. Analisa dan Perencanaan Pendapatan APBD-P dan RAPBD Tahun Anggaran Berikutnya 8. Penyelenggaraan Pengelolaan Kas Umum Daerah Kabupaten Malinau 9. Biaya Operasional Kepala Daerah 10. Biaya Operasional Wakil Kepala Daerah 11. Monitoring dan Evaluasi Inventarisasi Aset Daerah Kab. Malinau 12. Penyediaan Barang dan Jasa Kebutuhan Rutin Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 13. Pengelolaan Urusan Umum Pemerintahan 14. Kegiatan Forum Komunikasi Unsur Muspida 15. Update Oracle 16. Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah 17. Penerbitan DPA dan SPD Kegiatan OPD Kabupaten Malinau T.A 2020 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Penyusunan RAPBD TH. 2021 2. Persentase Rancangan Peraturan Daerah RAPBD TH. 2021 3. Persentase Penyusunan Raperda Tentang P-APBD TA.2020 4. Persentase Rancangan Perubahan Peraturan Daerah RAPBD TH. 2020 5. Persentase penyusunan Peraturan Daerah Tentang pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD 6. Persentase penyusunan dokumen Peraturan KDH Tentang penjabaran Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD 7. Persentase Analisa perencanaan dan Pendapatan APBD-P dan RAPBD Tahun anggaran berikutnya 8. Persentase penyelenggaraan Rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran Kas

	<ol style="list-style-type: none"> 18. Rekonsiliasi gaji dan pemuktahiran data CPNS dan PNS 19. Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa 2021 20. Persentase Pergeseran Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2020 21. Sosialisasi Pajak Daerah 22. Pelaporan Data Elektronik SIKD dan Koordinasi APBD 23. Sosialisasi Tim Saber Pungli 24. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB P2) 25. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah 26. Penertiban dan Pengawasan Pajak Daerah 27. Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Asli Daerah 28. Evaluasi Realisasi Capaian Kinerja 29. Pemeliharaan SIMDA Keuangan 30. UPDATE SIMPATDA 31. Analisa Zona Nilai Tanah Kecamatan Malinau Kota 32. Penyusunan Data Laporan Realisasi APBD TA. 2020 33. Rekonsiliasi Penerimaan Daerah 34. Pelaporan Dana Transfer Pusat dan Bantuan Keuangan Provinsi 35. Penyusunan RKBMD dan RKPBMMD 36. Penghapusan dan Pemindahtangan Barang Milik Daerah 37. Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Berbasis Akrual 38. Update Data Wajib Pajak (PBB-P2) 39. Pemeliharaan Jaringan Mobile Pos Kasir Bisnis 40. Pengadaan Stand Papan Reklame 41. Rekonsiliasi, Pelaporan Barang Persediaan Berbasis 	<ol style="list-style-type: none"> Umum Daerah 9. Persentase penyediaan Biaya operasional Kepala Daerah 10. Persentase penyediaan Biaya operasional Wakil Kepala Daerah 11. Persentase Monitoring dan Evaluasi Inventarisasi Aset Daerah 12. Persentase penyediaan Barang dan Jasa Kebutuhan Rutin Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 13. Persentase Pengelolaan Urusan Umum Pemerintahan 14. Persentase Pelaksanaan Rapat-rapat Forum Komunikasi Unsur Pimpinan Daerah 15. Jumlah Perpanjangan Lisensi Oracle 16. Persentase Pemeriksaan Aset yang akan dilelang dari Laporan Pengelolaan BMD 17. Persentase Penerbitan DPA dan SPD 18. Persentase Rekonsiliasi Gaji dan Pemuktahiran Data CPNS dan PNS
--	--	--

		<p>Akrual</p> <p>42. Monitoring, Evaluasi dan Verifikasi Penggunaan Dana Hibah dan Bansos TA.2020</p>	<p>19. Persentase penyusunan Buku Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Malinau</p> <p>20. Persentase Pergeseran Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2020</p> <p>21. Jumlah Bulan Sosialisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>22. Persentase pelaporan Data APBD Secara Offline dan Online Ke Kementrian Keuangan</p> <p>23. Persentase pelaksanaan sosialisasi Tim Saber Pungli</p> <p>24. Persentase pelaksanaan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB P2)</p> <p>25. Persentase pelaksanaan Pendataan dan Penagihan WP</p> <p>26. Persentase pelaksanaan Penertiban dan Pengawasan Pajak Daerah Kabupaten Malinau</p> <p>27. Persentase pelaksanaa Evaluasi dan</p>
--	--	---	--

			<p>Pelaporan PAD</p> <p>28. Persentase pelaksanaan Rapat Evaluasi Realisasi Capaian Kinerja</p> <p>29. Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan SIMDA Keuangan</p> <p>30. Persentase pelaksanaan Update SIMPATDA</p> <p>31. Persentase pelaksanaan Survey Nilai Tanah Malinau Kota</p> <p>32. Persentase Akumulasi Laporan Realisasi APBD Tepat Waktu</p> <p>33. Pesentase Pelaksanaan kegiatan Rekonsiliasi Penerimaan Daerah</p> <p>34. Persentase Pelaporan dana Transfer pusat dan bantuan keuangan Provinsi</p> <p>35. Persentase penyusunan Dokumen RKBU dan RKPBMMD OPD</p> <p>36. Persentase pelaksanaan Penghapusan dan Pemindahtangan Barang Milik Daerah</p> <p>37. Persentase pelaksanaan Rekonsiliasi Barang Milik</p>
--	--	--	--

			<p>Daerah Berbasis Akrua</p> <p>38. Persentase pelaksanaan Update Data Wajib Pajak Yang di Update (PBB-P2)</p> <p>39. Persentase Pemeliharaan Jaringan Mobile Pos Kasir Bisnis</p> <p>40. Jumlah Stand Papan Reklame Untuk Publikasi Umum</p> <p>41. Persentase tersinkronisasinya laporan barang persediaan habis pakai Pemerintah kabupaten Malinau</p> <p>42. Persentase Singkronisasi Dokumen Kelengkapan administrasi Belanja dan Pelaporan PPKD</p>
--	--	--	--

3. Strategi dan Arah Kebijakan

a) **Strategi** Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau

Proses perencanaan strategi sebagaimana yang tertera pada Renstra Bagian Pengelola Keuangan TA 2016-2021, merupakan pedoman dan rencana yang menyeluruh tentang segala upaya yang meliputi penetapan kebijakan, program dan kegiatan dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Strategi memberikan kesatuan pandang dalam melaksanakan tujuan dan sasaran.

Dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan cara pencapaiannya. Adapun cara mencapai tujuan dan sasaran meliputi penetapan Strategi. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau menetapkan strategi dalam melaksanakan Program dan Kegiatan, sebagai berikut;

1. Melaksanakan dan mengembangkan Pengelolaan keuangan Daerah berbasis teknologi informasi secara konsisten
2. Melaksanakan Pengelolaan keuangan daerah yang baik, transparan dan akuntabel
3. Menyajikan laporan keuangan daerah sesuai dengan SAP berbasis akrual
4. Mengembangkan sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah
5. Peningkatan partisipasi desa dalam perencanaan, penganggaran, pengendalian, pelaksanaan dan Pengelolaan keuangan Desa
6. Penyebarluasan informasi pajak dan retribusi daerah
7. Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah
8. Meningkatkan kualitas maupun kuantitas sarana dan prasarana penunjang Pengelolaan keuangan daerah
9. Melaksanakan dan mengembangkan kualitas Pengelolaan barang milik daerah

b) Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau

Kebijakan adalah merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan petunjuk bagi program dan kegiatan, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Malinau. Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Malinau menetapkan 3 (tiga) kebijakan dengan uraian, sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau.
- 2) Memperkuat kemampuan SDM Aparatur.
- 3) Mengikuti perkembangan Regulasi tentang keuangan Daerah

4. Program

Program Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2020 sebagai penjabaran dari tujuan stratejik adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Program dan Kegiatan
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau

No	Program	Kegiatan
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan alat tulis kantor BPKD 2. Penyediaan barang cetakan, 3. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 4. Penunjang Administrasi Staf Ahli Bidang Hukum, Kesbang dan Pemerintahan. 5. Penunjang Administrasi Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan, Ekonomi dan Pembangunan. 6. Penunjang Administrasi Staf Ahli Bidang Aparatur, Pelayanan Publik dan Hubungan Antar Lembaga 7. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

		<p>PBB P2 dan BPHTB</p> <p>8. Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi dan Bimtek Pajak Daerah</p> <p>9. Penataan Administrasi Penyusunan Program, Kepegawaian dan Keuangan</p> <p>10. Penatausahaan Dokumen dan Benda Berharga Pajak Daerah</p> <p>11. Pengadaan Peralatan Kantor</p>
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	<p>1. Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas Instalasi Jaringan SIMDA Keuangan pada OPD di Sekitar Ibu Kota Kabupaten</p> <p>2. Pemeliharaan Server dan Aplikasi SIM PBB P-2</p> <p>3. Digitalisasi Arsip Pencairan SP2D OPD</p> <p>4. Pemeliharaan Sistem Aplikasi Penggajian Kabupaten Malinau (Sistem Informasi Manajemen Gaji TASPEN)</p> <p>5. Pemeliharaan Aplikasi Pelaporan Secara Online (SPT Online)</p> <p>6. Pengadaan Website Online PBB P2 dan BPHTB</p>
3	Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	<p>1. Pembinaan Kepada Bendahara Pengelola Keuangan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau</p> <p>2. Pembinaan kepada Penyusunan Program OPD Se-Kabupaten Malinau</p> <p>3. Peningkatan SDM Penatausahaan PPK-OPD Se-Kabupaten Malinau</p> <p>4. Peningkatan SDM Pengelola Aset/Barang Daerah</p> <p>5. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah</p> <p>6. Peningkatan SDM Aparatur Kearsipan</p> <p>7. Pembinaan Bendahara OPD Tentang Perpajakan</p> <p>8. Pelatihan Penatausahaan Keuangan Bendahara OPD</p> <p>9. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Pengelola Keuangan</p> <p>10. Pelatihan dan Pengembangan SDM Aparatur Sungram</p> <p>11. Pelatihan dan Pengembangan SDM Aparatur Kepegawaian</p>
4	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	<p>1. Pelaporan dan Koordinasi Penyaluran Dana Desa Ke Provinsi dan Pusat</p>
5	Program Peningkatan dan	<p>1. Penyusunan Rancangan Peraturan</p>

Pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah

- Daerah tentang APBD 2021
2. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD 2021
3. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2020
4. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 2020
5. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
6. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
7. Analisa dan Perencanaan Pendapatan APBD-P dan RAPBD Tahun Anggaran Berikutnya
8. Penyelenggaraan Pengelolaan Kas Umum Daerah Kabupaten Malinau
9. Biaya Operasional Kepala Daerah
10. Biaya Operasional Wakil Kepala Daerah
11. Monitoring dan Evaluasi Inventarisasi Aset Daerah Kab. Malinau
12. Penyediaan Barang dan Jasa Kebutuhan Rutin Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
13. Pengelolaan Urusan Umum Pemerintahan
14. Kegiatan Forum Komunikasi Unsur Muspida
15. Update Oracle
16. Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
17. Penerbitan DPA dan SPD Kegiatan OPD Kabupaten Malinau T.A 2020
18. Rekonsiliasi gaji dan pemuktahiran data CPNS dan PNS
19. Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa 2021
20. Persentase Pergeseran Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2020
21. Sosialisasi Pajak Daerah
22. Pelaporan Data Elektronik SIKD dan Koordinasi APBD
23. Sosialisasi Tim Saber Pungli
24. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB P2)
25. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah

		<ul style="list-style-type: none"> 26. Penertiban dan Pengawasan Pajak Daerah 27. Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Asli Daerah 28. Evaluasi Realisasi Capaian Kinerja 29. Pemeliharaan SIMDA Keuangan 30. UPDATE SIMPATDA 31. Analisa Zona Nilai Tanah Kecamatan Malinau Kota 32. Penyusunan Data Laporan Realisasi APBD TA. 2020 33. Rekonsiliasi Penerimaan Daerah 34. Pelaporan Dana Transfer Pusat dan Bantuan Keuangan Provinsi 35. Penyusunan RKBMD dan RKPBM 36. Penghapusan dan Pemindahtangan Barang Milik Daerah 37. Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Berbasis Akrua 38. Update Data Wajib Pajak (PBB-P2) 39. Pemeliharaan Jaringan Mobile Pos Kasir Bisnis 40. Pengadaan Stand Papan Reklame 41. Rekonsiliasi, Pelaporan Barang Persediaan Berbasis Akrua 42. Monitoring, Evaluasi dan Verifikasi Penggunaan Dana Hibah dan Bansos TA.2020
--	--	---

B. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang rencana jangka pendek akan dilaksanakan melalui kegiatan tahunan. Penyusunan rencana kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran yang merupakan komitmen bagi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau untuk mencapainya pada tahun 2020.

Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, dimana indikator kinerja adalah ukuran

kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

Target kinerja dari sasaran strategis yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Rencana Kinerja Tahunan
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau
Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya Informasi Keuangan dan aset Daerah Kabupaten Malinau terkini secara Cepat dan akurat serta Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang baik, Transparan dan akuntable.	Status Laporan Keuangan Daerah (Opini BPK)	Predikat	WTP

Adapun Rencana Kerja terhadap program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Rencana Kerja Tahun 2020
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau

No	Program	Indikator Sasaran	Target	Pagu Anggaran
1	2	3	4	5

1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Jumlah Jenis ATK yang dibutuhkan	43 Jenis	355.000.000
		2. Jumlah jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	97 Jenis	531.440.800
		3. Jumlah Pelaksanaan rapat Tupoksi PNS BPKD	20 kali	1.800.000.000
		4. Jumlah Bulan Pelayanan Pemerintahan Staf Ahli Bidang Hukum Kesbang dan Pemerintahan	8 Kali	100.000.000
		5. Jumlah Bulan Pelayanan Pemerintahan kebutuhan Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan, Ekonomi dan Pembangunan	8 Kali	100.000.000
		6. Jumlah Bulan Pelayanan Pemerintahan kebutuhan Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan, Ekonomi dan Pembangunan	8 Kali	100.000.000
		7. Jumlah Bulan Terlaksananya koordinasi dan konsultasi PBB P2 dan BPHTB	20 Kali	125.000.000
		8. Jumlah Bulan Terlaksananya rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Pajak Daerah	5 Kali	350.000.000
		9. Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	20 Kali	1.200.000.000
		10. Jumlah Dokumen dan Benda Berharga Pajak Daerah	-	-

		11. Jumlah Jenis Peralatan Perkantoran yang dibutuhkan	6 Jenis	200.000.000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1. Jumlah Pemeliharaan Jaringan SIMDA online dengan SKPD sekitar ibu kota Kabupaten	12 Kali	670.000.00
		2. Jumlah Bulan terupdate nya server dan database aplikasi SIM PBB	12 bulan	115.000.000
		3. Jumlah Sistem Data Elektronik Arsip Pencairan SP2D OPD	-	-
		4. Jumlah Update data Sistem Informasi Manajemen Gaji	4 Kali	100.000.000
		5. Jumlah Pemeliharaan Aplikasi Pelaporan secara Online (SPT Online)	12 bulan	90.000.000
		6. Jumlah Bulan Pengadaan Website Online PBB P2 dan BPHTB	12 bulan	365.287.636,12
3	Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	1. Jumlah Bendahara SKPD mengikuti Bimbingan dan pelatihan Keuangan	56 orang	250.000.000
		2. Jumlah aparatur mengikuti Pelaksanaan Pengendalian Administrasi Penyusunan Program, Kepegawaian dan Keuangan dengan Efektif dan Ifisien	56 orang	600.000.000
		3. jumlah PPK-SKPD se Kabupaten Malinau yang mengikuti Diklat	56 orang	200.000.000

		4. jumlah PNS Pengelola Aset OPD yang mengikuti Bimtek pengelola Aset/barang Daerah	112 orang	200.000.000
		5. Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah	112 orang	1.511806.296.65
		6. Jumlah aparatur Bidang perbendaharaan yang mengikuti Bimtek	20 orang	100.000.000
		7. Jumlah Bendahara OPD yang mengikuti Bimtek tentang Perpajakan	112 orang	200.000.000
		8. Jumlah Bendahara OPD Yang mengikuti Penatausahaan Keuangan	112 orang	200.000.000
		9. Jumlah diklat Teknis Pengelolaan Keuangan yang di ikuti	2 Kali	350.000.000
		10. Jumlah diklat Teknis Pengembangan SDM Aparatur Sungram yang di ikuti	2 Kali	100.000.000
		11. Jumlah diklat Teknis Pengembangan SDM Aparatur Kepegawaian Yang di kuti	-	-
4	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1. Jumlah Pelaporan dan Koordinasi tentang Penyaluran Dana Desa Ke Provinsi dan Pusat	9 Kali	351.128.935,41

5	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah	1. Jumlah Rapat Penyusunan RAPBD TH. 2021	7 kali	761.806.296.65
		2. Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah RAPBD TH. 2021	200 Dokumen	621.354.722.49
		3. Jumlah Rapat Penyusunan Raperda Tentang P-APBD TA.2020	7 kali	606.467.616,03
		4. Jumlah Dokumen Rancangan Perubahan Peraturan Daerah RAPBD TH. 2020	200 Dokumen	641.580.509.57
		5. Jumlah Dokumen penyusunan Peraturan Daerah Tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	200 Dokumen	800.000.000
		6. Jumlah dokumen Peraturan KDH Tentang penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	200 Dokumen	750.000.000
		7. Jumlah Analisa perencanaan dan Pendapatan APBD-P dan RAPBD Tahun anggaran berikutnya	2 kali	70.000.000
		8. Jumlah Kegiatan Rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran Kas Umum Daerah	12 kali	300.000.000
		9. Jumlah Jenis Kebutuhan Operasional Kepala Daerah yang dibutuhkan	7 jenis	9.000.000.000
		10. Jumlah Jenis Kebutuhan Operasional Kepala Daerah yang	7 jenis	4.000.000.000

		dibutuhkan	
		11. Jumlah Monitoring dan Evaluasi Inventarisasi Aset Daerah	10 kali 210.000.000
		12. Jumlah Jenis Barang dan Jasa Kebutuhan Rutin Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	7 jenis 4.880.000.000
		13. Jumlah jenis Pengelolaan Urusan Umum Pemerintahan	7 jenis 8.050.000.000
		14. jumlah Pelaksanaan Rapat-rapat Forum Komunikasi Unsur Pimpinan Daerah	10 kali 546.406.416,75
		15. Jumlah Perpanjangan Lisensi Oracle	2 kali 105.225.787.08
		16. Jumlah Pemeriksaan Aset yang akan dilelang dari Laporan Pengelolaan BMD	150 kali 700.000.000
		17. Jumlah Penerbitan DPA dan SPD	56 OPD 250.000.000
		18. Jumlah pertemuan Rekonsiliasi Gaji dan Pemuktahiran Data CPNS dan PNS	18 kali 300.000.000
		19. Jumlah Buku Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Malinau	220 buku 300.000.000
		20. Jumlah Pergeseran Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2020	5 kali 375.564.467.70
		21. Jumlah Bulan Sosialisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	- -
		22. Jumlah pelaporan Data APBD Secara Offline dan Online Ke Kementrian Keuangan	12 kali 450.000.000
		23. Jumlah sosialisasi Tim Saber Pungli	11 kali 400.000.000
		24. Jumlah Pemungutan Objek Pajak PBB P2	25 kali 416.513.106.98

25. Jumlah Pendataan dan Penagihan WP	16 kali	193.120.914.47
26. Jumlah Penertiban dan Pengawasan Pajak Daerah Kabupaten Malinau	13 kali	117.231.336.71
27. Jumlah Evaluasi dan Pelaporan PAD	4 kali	60.000.000
28. Jumlah pelaksanaan Rapat Evaluasi Realisasi Capaian Kinerja	4 kali	105.338.680.62
29. Jumlah Bulan Pemeliharaan SIMDA Keuangan	12 bulan	500.000.000
30. Jumlah Update SIMPATDA	3 kali	135.000.000
31. Jumlah Survey Nilai Tanah Malinau Kota	5 tahap	70.225.787.08
32. Jumlah Jenis Laporan realisasi OPD Tahun 2020 Perbulan, Triwulan dan semester	15 jenis	150.000.000
33. jumlah Pelaksanaan kegiatan Rekonsiliasi Penerimaan Daerah	5 kali	350.000.000
34. Jumlah laporan dana Transfer pusat dan bantuan keuangan Provinsi	48 laporan	386.241.828,95
35. Jumlah Dokumen RKBU dan RKPBM OPD	-	-
36. Jumlah Barang Milik Daerah yang dihapus dan dipindah tangankan	18 kali	250.000.000
37. Jumlah pelaksanaan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Berbasis Akrua	18 kali	250.000.000
38. Jumlah pelaksanaan Update Data Wajib Pajak Yang di Update (PBB-P2)	12 kali	155.225.787,08
39. Jumlah Pemeliharaan	4 kali	116.033.500

	Jaringan Mobile Pos Kasir Bisnis		
	40. Jumlah Stand Papan Reklame Untuk Publikasi Umum	-	-
	41. Jumlah sinkronisasinya laporan barang persediaan habis pakai Pemerintah kabupaten Malinau	4 kali	123.649.821,57
	42. Jumlah Singkronisasi Dokumen Kelengkapan administrasi Belanja dan Pelaporan PPKD	4 kali	639.753.118,30

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.

Dengan Perjanjian Kinerja, diharapkan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau dapat lebih terarah dan terdapat tolok ukur bagi manajemen untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah selaras dengan upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Malinau.

Adapun Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dr. DUMBERBRIL, SE., MM**
NIP : 19690314 200112 1 001
Jabatan : **KEPALA BPKD KABUPATEN MALINAU**

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : **Dr. YANSEN TP, M.Si**
Jabatan : **BUPATI MALINAU**

Selaku atasan Pihak Pertama selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malinau, 09 Januari 2020

Pihak Kedua
Bupati Malinau,


Dr. YANSEN TP, M.Si

Pihak Pertama ✓
Kepala BPKD Kabupaten Malinau,


Dr. DUMBERBRIL, SE., MM
NIP. 19690314 200112 1 001

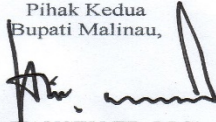
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN MALINAU

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKTOR KINERJA	TARGET
1.	Tersedianya informasi keuangan Daerah Kabupaten Malinau terkini secara Cepat	Status Laporan Keuangan Daerah (Opini BPK)	WTP

dan akurat serta mewujudkan Pengelolaan keuangan daerah yang baik, Transparan dan akuntable		
---	--	--

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 3.750.000.000,-	APBD
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 1.599.000.000,-	APBD
3.	Program Peningkatan Kapasitas sumber daya Aparatur	Rp. 2.850.000.000,-	APBD
4.	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Rp. 500.000.000,-	APBD
5.	Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 32.820.000.000,-	APBD
Jumlah		Rp 41.519.000.000,-	

Malinau, 09 Januari 2020

Pihak Kedua
Bupati Malinau,

Dr. YANSEN TP, M.Si

Pihak Pertama ✓
Kepala BPKD Kabupaten Malinau,


Dr. DUMBERBRIL, SE., MM
NIP. 19690314 200112 1 001